

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN  
(PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJATERAAN  
MASYARAKAT MISKIN DI KELURAHAN  
KENANGAN BARU KECAMATAN  
PERCUT SEI TUAN KABUPATEN  
DELI SERDANG**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**BAGINDA RAHMADSYAH  
188520126**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/11/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN  
(PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJATERAAN  
MASYARAKAT MISKIN DI KELURAHAN  
KENANGAN BARU KECAMATAN  
PERCUT SEI TUAN KABUPATEN  
DELI SERDANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana di  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area



**OLEH:  
BAGINDA RAHMADSYAH  
188520126**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/11/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

NAMA : Baginda Rahmadsyah

NPM : 188520126

Prodi : Administrasi Publik

### Disetujui Oleh: Komisi Pembimbing



**Dr. Drs. Indra Muda, MAP**  
Pembimbing I



**Nina Angelia, S.Sos, M.Si**  
Pembimbing II

### Mengetahui



**Dr. Ayalid Musthafa, S.Sos, M.IP**  
Dekan



**Dr. Drs. Indra Muda, MAP**  
Ka.Prodi Administrasi Publik

Tanggal lulus: 11 September 2024

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa Skripsi yang telah saya tulis sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Medan Area yang merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun yang menjadi bagian-bagian tertentu dalam penulisan Skripsi ini yang saya kutip dari berbagai sumber, telah di tulis sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang telah berlaku, apabila dikemudian hari ditemukannya plagiat dalam Skripsi ini.

Medan, 11 September 2024



Baginda Rahmadsyah  
(188520126)



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas Medan Area, Saya yang Bertanda Tangan di Bawah ini:

Nama : Baginda Rahmadsyah  
NPM : 188520126  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Sosial Politik  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: "IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DI KELURAHAN KENANGAN BARU KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI". Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 11 September 2024



Baginda Rahmadsyah

(188520126)

## ABSTRAK

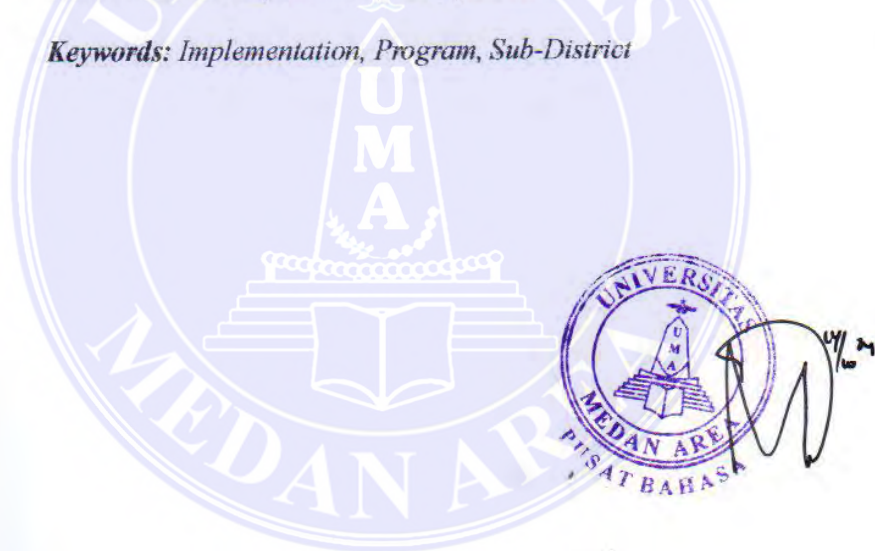
Implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang individu atau pejabat pemerintah atau kelompok swasta untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam suatu keputusan kebijakan. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan tunai bersyarat yang di keluarkan pemerintah untuk sasaran Keluarga Sangat Miskin (KSM). Rumusan masalah dalam penelitian yaitu Bagaimana Implementasi PKH di Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Apa saja faktor-faktor Penghambat Implementasi PKH di Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan teori dari Van Meter Dan Van Horn yaitu Standar dan sasaran kebijakan, Sumber daya, Karakteristik organisasi pelaksana, Komunikasi, Sikap para pelaksana, kondisi sosial dan ekonomi. Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif dimana semua rumusan masalah dipecahkan melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Kajian ini menyimpulkan bahwa Dalam Pelaksanaan bantuan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kenangan Baru pada penyaluran belum terlaksana dengan baik dilihat dengan Komunikasi, Sikap para pelaksana, kondisi sosial dan ekonomi yang masih kurang baik. Selain itu masih terdapat faktor penghambat dalam Pelaksanaan PKH yaitu mengenai dana yang terlambat disalurkan ke penerima, serta adanya data yang ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tidak sinkron dengan keadaan Keluarga Penerima Manfaat.

**Kata Kunci: Implementasi, Program, Kelurahan.**

### ABSTRACT

*Implementation refers to actions taken by an individual, government official, or private group to achieve the objectives outlined in a policy decision. The Program Keluarga Harapan (PKH) is a conditional cash transfer provided by the government to target extremely poor families/ Keluarga Sangat Miskin (KSM). The problem statement in this research was how the PKH was implemented in Kenangan Baru Sub-District, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency, and what were the inhibiting factors in the implementation of PKH in Kenangan Baru Sub-District, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency. This research used the theory from Van Meter and Van Horn, which includes policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing organizations, communication, attitudes of implementers, and socio-economic conditions. The type of research used was qualitative, where all problems were solved through interviews, observations, and documentation. The study concluded that the implementation of the Family Hope Program in Kenangan Baru Sub-District had not been well executed, as seen through poor communication, attitudes of implementers, and socio-economic conditions. Additionally, the inhibiting factors in the implementation of PKH included delayed distribution of funds to recipients and discrepancies between the data in the Integrated Social Welfare Data and the actual conditions of the beneficiary families.*

**Keywords:** Implementation, Program, Sub-District





## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis Baginda Rahmadsyah anak dari Bapak Tavip Handayani Harahap dan Ibu Agustina Aida Tanjung, lahir di Medan, 03 Juli 1999, Penulis merupakan anak ke-3 dari 3 bersaudara.

Penulis bersekolah di Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah 30 Medan pada tahun 2005, selanjutnya pada tahun 2011 penulis melanjutkan sekolah ke sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 12 Medan dan melanjutkan sekolah ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 18 Medan pada tahun 2014 dan Lulus pada tahun 2017.

Penulis melanjutkan jenjang pendidikan Strata 1 (S1) ke Universitas Medan Area pada tahun 2018 dengan mengambil jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, hingga saat ini penulis masih menjalani proses perkuliahan di Universitas tersebut. Penulis Juga Merupakan Fans Sejati dari Klub Inggris, Manchester United.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, ucapan puji dan syukur penelitiungkapkan kehadiran ALLAH SWT yang masih senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Skripsi ini berhasil diselesaikan.dengan judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DI KANTOR KELURAHAN KENANGAN BARU KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG”**.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Drs. Indra Muda, MAP dan Ibu Nina Angelia, S.Sos, M,Si selaku pembimbing serta Ibu Dr. Chairika Nasution, S.AP, M.AP. yang telah banyak memberikan saran. Disamping itu penghargaan penulis sampaikan kepada Bapak Rizal Arifin, S.STP selaku Lurah Kelurahan Kenangan Barudan Ibu Windasari S.Sos selaku Pendamping PKH yang telah membantu penulis selama melaksanakan penelitian. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah, ibu, serta seluruh keluarga atas segala doa dan perhatiannya.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir skripsi ini. Penulis berharap tugas akhir skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih

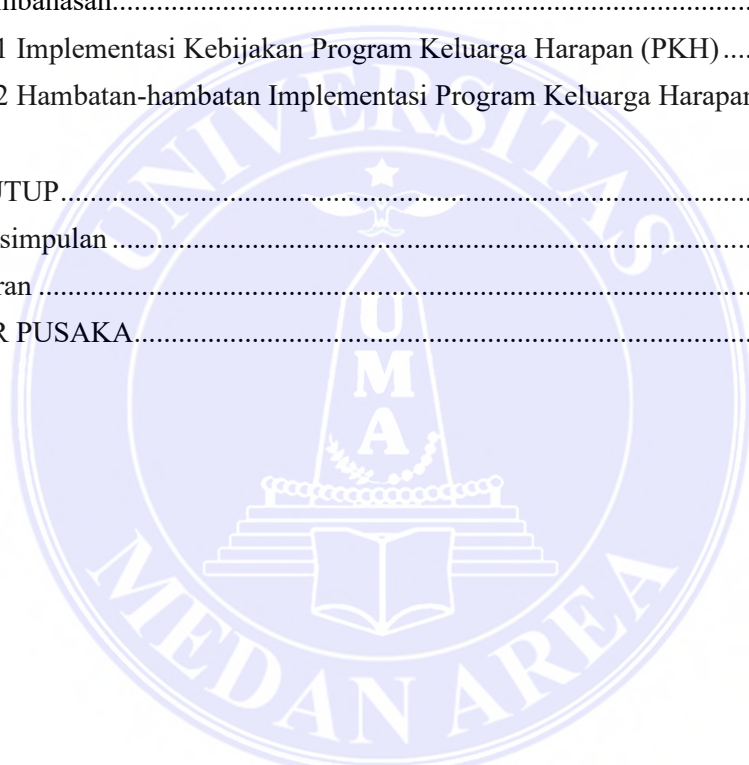
Medan, September 2024

Baginda Rahmadsyah

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
RIWAYAT HIDUP .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
IPENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	4
II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Implementasi Kebijakan .....	5
2.2 Model Implementasi Kebijakan.....	6
2.3 Pengertian Kemiskinan .....	9
2.3.1. Ukuran Kemiskinan .....	10
2.3.2 Faktor-Faktor Penentu kemiskinan .....	11
2.3.3 Konsep Kesejahteraan.....	13
2.4 Program Keluarga Harapan.....	14
2.4.1 Dasar Hukum .....	15
2.4.2 Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH).....	16
2.4.3 Sasaran Penerima Bantuan PKH.....	16
2.4.4 Kewajiban Peserta PKH.....	18
2.4.5 Besaran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).....	19
2.5 Kelurahan .....	19
2.6 Penelitian Terdahulu .....	20
2.7 Kerangka Pemikiran.....	22
III METODE PENELITIAN.....	25
3.1. Jenis Penelitian.....	25
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	26
3.3 Informan Penelitian.....	27

3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.5. Teknik Analisis Data.....	29
IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	32
4.1 Hasil Penelitian .....	32
4.1.1 Sejarah Kelurahan Kenangan Baru .....	32
4.1.2. Letak Geografis.....	33
4.1.3 Pemerintahan.....	34
4.1.4 Kependudukan .....	34
4.1.5 Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kenangan Baru .....	35
4.2 Pembahasan.....	45
4.2.1 Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) .....	47
4.2.2 Hambatan-hambatan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) .....	62
V PENUTUP.....	65
5.1 Kesimpulan .....	65
5.2 Saran .....	66
DAFTAR PUSAKA.....	67



## DAFTAR TABEL

Daftar Tabel 1. Skema Bantuan PKH .....	19
Daftar Tabel 2. Penelitian Terdahulu .....	20
Daftar Tabel 3. Waktu Penelitian.....	27
Daftar Tabel 4. Pejabat Lurah Kenangan Baru .....	33
Daftar Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....	35
Daftar Tabel 6. Sarana Pendidikan.....	36
Daftar Tabel 7. Sarana Kesehatan.....	37
Daftar Tabel 8. Penerima PKH Tahun 2022 .....	46





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....24



# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang Masalah

Implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang individu atau oleh pejabat pemerintah atau kelompok swasta untuk mencapai tujuan yang digarisakan dalam suatu keputusan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan ini akan menjadi tolak ukur keberhasilan atau kegagalan dalam memberikan pengaruh bagi masyarakat. Dalam rangkaian tahapannya, sebuah kebijakan yang bersifat umum akan dijabarkan kedalam beberapa peraturan lanjutan yang mengatur dari kebijakan umum tersebut.

Menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera merupakan salah satunya makna dari kemerdekaan, salah satunya dengan menekan kemiskinan. Dalam mengatasi hal ini pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia serta memupuk kesejahteraan masyarakat kurang mampu sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dengan maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan serta kualitas dan kelangsungan hidup masyarakat miskin.

Untuk meminimalisir jumlah penduduk miskin diperlukan kebijakan dalam pengurangan tingkat kemiskinan. Yang dimaksud dengan pengurangan tingkat kemiskinan merupakan sebuah kebijakan atau strategi yang harus diatasi oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk dalam pelaksanaan perbaikan sosial disemua lapisan masyarakat terutama untuk kalangan masyarakat kurang mampu.

Dalam menyikapi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk mengurangi masalah kemiskinan,

Sesuai dengan tujuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat miskin pemerintah menyalurkan berbagai bentuk bantuan sosial untuk membantu masyarakat dalam melanjutkan hidupnya, salah satu bantuan tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH (Permensos RI No 1 Tahun 2018 tentang PKH). Program keluarga harapan (PKH) ini dilatar belakangi dari adanya problem yang paling utama dalam masyarakat miskin merupakan rendahnya kualitas SDM dan kondisi masyarakat di Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan masih banyak keluarga kurangnya perhatian terhadap pendidikan dan kesehatan ibu hamil dan kualitas gizi pada bayi dan anak-anak dalam masa pertumbuhan.

Dari pengamatan yang dilakukan peneliti adanya kejanggalan dalam pelaksanaan program keluarga harapan ini, dimana salah satu penerima bantuan PKH merupakan masyarakat yang tergolong mampu. Dan adanya masyarakat yang layak menerima bantuan PKH ini tetapi tidak dapat menerima bantuan program keluarga harapan ini. Banyak masyarakat yang berkeluh kesah dalam hal bantuan ini ada beberapa masyarakat mengalami kemacetan dana bantuan dari program keluarga harapan ini sehingga merasa dirugikan dan kurangnya kepuasan dalam pelayanan petugas pendamping PKH.

Tentunya dalam pelaksanaan program PKH, masalah tidak semua atas kelalaian petugas, pasti memiliki hambatan yang dihadapi oleh petugas baik itu dari segi penyaluran dana bantuan maupun kendala lainnya, yang memiliki pengaruh didalam implementasi kebijakan program keluarga harapan (PKH) dilokasi tersebut.

Berdasarkan dari paparan di atas, penulis tertarik untuk melihat Bagaimana Implementasi PKH di Kelurahan Kenangan Baru yang meliputi proses tahapan, faktor-faktor yang menjadi penghambat (permasalahan-permasalahan) hingga hasil kinerja serta manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat miskin tersebut. Oleh karena itu penulis mengangkatnya dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?
2. Apa saja faktor-faktor Penghambat Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?



### 1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti mempunyai jalan dan tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakannya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi program keluar harapan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam penerapan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Subjektif, penelitian ini bermanfaat untuk melatih, meningkatkan, dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, sistematis, dan metodologi penulis dalam menyusun suatu wacana baru dalam memperkaya ilmu pengetahuan.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi instansi terkait dan masyarakat, terkhusus di tempat penelitian ini dilaksanakan, agar mampu dapat terus melaksanakan kewajibannya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan aktivitas yang mengarah pada pelaksanaan dalam mencapai tujuan dari sebuah keputusan yang ditetapkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi adalah pelaksanaan ataupun penerapan. Sementara itu, menurut Jones dalam Mulyadi (2016: 45) mengemukakan bahwa implementasi adalah “Those activities directed toward putting a program into effect”, yang berarti proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya. “Sehingga proses implementasi baru hendak dijalankan apabila tujuan dan sasaran telah ditentukan, program kegiatan telah tersusun dan anggaran telah tersedia serta telah didistribusikan untuk mencapai tujuan maupun sasaran tersebut”.

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan program. Implementasi menurut Budi Winarno, (2007:144) pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*).

Setelah suatu kebijakan negara memperoleh legitimasi, agar diperoleh *intended impact*, kiranya perlu diimplementasikan. Van Meter dan Van Horn 1978

dalam Suaib (2016:81) , merumuskan mengenai proses implementasi sebagai *“those actions by public or private individuals (our groups) that are directed at the achievement of objectives set forth i prior policy decisions”* Makna perumusan diatas ialah bahwa implementasi mengandung pengertian tindakan yang dilakukan individu atau pejabat maupun swasta yang mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi dalam Mulyadi (2015:12) pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. .

Majone dan Wildavsky, 1978 dalam Suaib (2016:83) suatu kebijakan pada umumnya akan senantiasa ditransformasikan melalui tindakan implementasi, sehingga secara simultan mengubah sumber-sumber da tujuan-tujuan. Tindakan yang demikian itu, bukan hanya sekedar merancang bangun kebijakan, akan tetapi merancang kembali kebijakan sepanjang waktu.

## 2.2 Model Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah tahapan pelaksanaan dari suatu proses kebijakan yang ditetapkan oleh undang-undang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Riple dan Franklin dalam Handoyo (2012:94) Implementasi merupakan dapat terjadi sesudah disahkan oleh undang-undang yang dapat memberikan pengaruh atau

otoritas terhadap program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) maupun sejenis pengeluaran yang nyata (*tangible output*), Yang artinya suatu implementasi atau kebijakan yang umum dibuat berlandaskan pada peraturan dan keputusan yang diatur oleh undang-undang. Tentunya dalam pembuatan suatu kebijakan memiliki tujuan/target atau sasaran yang hendak dicapai.

Seperti yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Anggara (2014:232) Implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Tindakan yang dimaksud merupakan usaha untuk mengubah sebuah keputusan menjadi tindakan yang operasional dalam kurun waktu tertentu baik itu dalam rangka melanjutkan usaha-usaha dalam pencapaian perubahan besar ataupun perubahan kecil yang telah ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno, (2007:102) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (alat kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya, tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Sebagaimana dikatakan di atas bahwa capaian kebijakan dipengaruhi adanya beberapa variabel, variabel-variabel tersebut ditunjukkan pada beberapa model Implementasi kebijakan, menurut Van Meter dan Van Horn Samudra



Wibawa (1994:19) Implementasi kebijakan dipengaruhi adanya komunikasi, sumber-sumber (sumber daya), kecenderungan/sikap dan struktur birokrasi, standar dan sasaran kebijakan serta kondisi sosial ekonomi dan politik.

Dengan keberadaan suatu model akan mempermudah dalam memberikan sebuah pandangan tentang komponen- komponen apa saja dari objek, situasi atau proses yang sedang diteliti dan dilaksanakan. Dalam penelitian ini penulis berfokus pada model implementasi yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn yang disebut sebagai *A Model of the Policy Implementation Process*. Model ini berasumsi bahwa implementasi kebijakan mengikuti garis lurus dari kebijakan publik, pelaksana, dan kinerja kebijakan.

Dalam model implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2014:141-144) ada enam variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu, (Standar dan sasaran kebijakan, Sumber daya, Karakteristik Lembaga/Organisasi Pelaksana, Komunikasi dan Aktivitas Pelaksana, Sikap para pelaksana, Lingkungan sosial, ekonomi dan politik).

Model proses implementasi yang dikemukakan Oleh Van Meter Dan Van Horn pada dasarnya tidak bermaksud mengukur dan menjelaskan hasil akhir dari kebijakan pemerintah, namun lebih tepatnya itu untuk mengukur dan menjelaskan apa yang dinamakan pencapaian program karena dalam suatu kebijakan mungkin di implementasikan secara efektif, tetapi gagal memperoleh dampak substansi yang sesuai karena kebijakan tidak disusun dengan baik atau karena faktor lainnya

### 2.3 Pengertian Kemiskinan

Menurut Jonathan Houghton dan Shahidur R. Khandker (Edward Tanujaya, 2012:2) “kemiskinan adalah kurangnya kesejahteraan”. Kemiskinan merupakan suatu hal masalah sosial yang bersifat mendunia. Sehingga kemiskinan dapat dikatakan sebagai masalah kemanusiaan yang dapat menghambat kesejahteraan masyarakat..

Kemiskinan adalah “Kurangnya Kesejahteraan”. Pendapat Konvensional mengaitkan kesejahteraan terutama dengan kepemilikan barang, sehingga masyarakat miskin diartikan sebagai mereka yang tidak memiliki pendapatan atau konsumsi yang memadai untuk membuat mereka berada di atas ambang minimal kategori sejahtera. Pandangan ini lebih melihat kemiskinan dalam kaitannya dengan masalah keuangan. Kemiskinan merupakan sebagai suatu kondisi yang terjadi karena tidak terpenuhinya keinginan pokok, yaitu pangan, sandang, kesejahteraan, pendidikan dan lain-lain. Kemiskinan dalam Suyanto (2001:29) merupakan ketidakmampuan untuk mendapatkan atau memiliki barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas.

Sajian tentang pengertian kemiskinan sedikit banyak memberikan pemahaman bagi kita tentang konsep kemiskinan. Ada beberapa para ahli yang mengutarakan tentang kemiskinan. Salah satunya menurut Suharto dalam Agus (2014:10) menyatakan bahwa: Kemiskinan pada hakikatnya merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak umat manusia ada. Kemiskinan merupakan persoalan kompleks dan tampaknya akan terus menjadi persoalan actual dari masa ke masa. Meskipun sampai saat ini belum ditemukan suatu rumusan maupun formula penanganan kemiskinan yang dianggap paling jitu dan sempurna, penemu-kenalan konsep dan strategi penanganan kemiskinan harus terus menerus diupayakan.

Sadar bahwa isu kemiskinan merupakan masalah laten yang senantiasa actual, pengajian konsep kemiskinan merupakan upaya positif guna menghasilkan pendekatan dan strategi yang tepat dalam menanggulangi masalah krusial yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini.

### 2.3.1. Ukuran Kemiskinan

Langkah pertama Untuk mengukur kemiskinan adalah menentukan indikator kesejahteraan, seperti pendapatan atau konsumsi per kapita. Informasi tentang kesejahteraan diperoleh dari data survei. Rancangan survei yang baik merupakan hal penting. Walaupun beberapa survei menggunakan sampel acak sederhana, sebagian besar survei menggunakan pengambilan sampel acak bertingkat (*stratified random sampling*). Metode ini memerlukan penggunaan bobot-bobot pengambilan sampel dalam analisis selanjutnya.

Menurut sajogyo dalam Agus (2014:14) menyatakan bahwa merinci kemiskinan dengan ciri-ciri :

- 1) Spesifikasi atas tiga garis kemiskinan yang mencakup konsepsi nilai ambang kecukupan pangan (*foodthreshold*).
- 2) Menghubungkan tingkat pengeluaran rumah tangga dengan ukuran kecukupan pangan.

Sedangkan menurut Nugroho dalam Agus (2014:14) menyatakan Ukuran-ukuran objektif kemiskinan sangat bervariasi, maka perlu hati-hati dan juga bersifat kritis terhadap penggunaan dan pemilihan alat ukur tersebut. Selain ukuran yang diajukan itu banyak mendapat kritik yang tajam karena hanya bersifat ekonomi semata-mata. Pada kenyataannya kebutuhan manusia sangat bervariasi sehingga setiap upaya penentuan garis kemiskinan yang direduksi

dalam soal-soal ekonomi tidak akan mewakili persoalan kemiskinan yang sesungguhnya. Kebutuhan manusia sangat beraneka ragam yang juga berkaitan dengan dimensi-dimensi politis, kebudayaan dan sosial, sehingga setiap upaya menentukan garis batas kemiskinan objektif sebaiknya juga mengacu pada multidimensionalitas tersebut.

Menurut ellis dalam Agus (2014:14) menyatakan bahwa persoalan bukan besarnya ukuran kemiskinan tetapi macam dimensi-dimensi yang terkait dalam gejala kemiskinan antara lain yaitu, (Kemiskinan dari dimensi ekonomi atau materi, dimensi ini bergantung pada sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan dari dimensi Sosial Budaya, dimensi dapat ditunjukkan melalui pelembagaan nilai-nilai seperti ketidakpedulian, apolitisme, fatalisme dan ketidakberdayaan. Kemiskian dengan dimensi struktural atau politik, dimensi ini menekankan bahwa mereka yang miskin baik struktural maupun politik pasti akan mengakibatkan kemiskinan ekonomi).

Dari dimensi kemiskinan ini memperjelas bahwa kemiskinan bukan hanya merupakan implikasi, tetapi dengan kerjasama juga bertujuan untuk mengatasi kemiskinan yang bersifat non-ekonomi. Dalam hal ini akan mengalami perubahan pembangunan nasional yang tidak hanya mengupayakan pertumbuhan ekonomi namun juga harus membangun manusia yang lebih berkualitas di bidang sosial budaya dan politik.

### **2.3.2 Faktor-Faktor Penentu kemiskinan**

Profil kemiskinan menggambarkan pola kemiskinan, tetapi pada dasarnya tidak berhubungan dengan penjelasan tentang penyebab-penyebab kemiskinan. Namun, demikian sebuah penjelasan logis mengapa beberapa orang tergolong

miskin sangat diperlukan bila kita ingin dapat memberantas akar masalah kemiskinan.

Menurut Howard White dan David Booth (Edward Tanujaya, 2012:159) Penyebab-penyebab utama, atau paling tidak berhubungan dengan, kemiskinan antara lain adalah:

- a. Karakteristik wilayah, mencakup kerentanan terhadap banjir atau topan, keterpencilan, kualitas pemerintahan, serta hak milik dan pelaksanaannya.
- b. Karakteristik masyarakat, mencakup ketersediaan infrastruktur (jalan, air, listrik) dan layanan (kesehatan, pendidikan) kedekatan dengan pada dan hubungan sosial.
- c. Karakteristik rumah tangga dan individu, diantaranya yang paling penting adalah:
  - Demografis, seperti jumlah anggota rumah tangga, usia struktur, rasio ketergantungan dan gender kepala rumah tangga;
  - Ekonomi, seperti status pekerjaan, jam kerja dan harta benda yang dimiliki; dan
  - Sosial, seperti status kesehatan dan nutrisi, pendidikan, dan tempat tinggal.

Bagian terlemah dari analisis kemiskinan yang disebut oleh Howard White dan David Booth 2003 (Jonathan Haughton dan Shahidur R Khandker 2012) sebagai “bagian tengah yang hilang” adalah mengembangkan pemahaman yang jelas tentang penyebab-penyebab kemiskinan yang mendasar dengan sebuah cara yang alamiah mengarah pada strategi yang efektif untuk memberantas kemiskinan. Karena tidak terdapat alasan untuk mempercayainya bahwa sumber-



sumber kemiskinan adalah sama di mana pun, diperlukan analisis khusus untuk setiap negara tertentu.

### 2.3.3 Konsep Kesejahteraan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kesejahteraan merupakan representasi yang bersifat kompleks karena mempunyai keterkaitan multidimensi. Secara umum kesejahteraan dapat diukur dari sisi demografi, kecukupan pangan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kondisi lingkungan. Kemiskinan merupakan bentuk ketidakmampuan untuk meraih kesejahteraan di pandang dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada dasarnya terdapat

beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan antara lain :

- 1) Sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat,
- 2) Struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat,
- 3) Potensi regional (sumberdaya alam, lingkungan dan insfrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi, dan
- 4) Kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional dan global.

#### 2.4 Program Keluarga Harapan

Program keluarga Harapan atau PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program perlindungan sosial yang juga dikenal di dunia Internasional dengan istilah *conditional cash transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

PKH tidak sama dan bukan merupakan lanjutan program Subsidi/ Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka

mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. Berdasarkan pengalaman negara-negara lain, program serupa sangat bermanfaat bagi keluarga miskin, terutama keluarga dengan kemiskinan kronis dalam Asrori, (2016).

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

#### **2.4.1 Dasar Hukum**

Secara teknis, kegiatan PKH melibatkan kementerian dan lembaga, yaitu: Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan Pemerintah Daerah. Sumber dana PKH berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya PKH dijalankan berdasarkan peraturan di bawah ini:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

- 2) Undang-undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial
- 3) Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- 4) Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- 5) Peraturan Presiden RI nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara rutin Non Tunai
- 6) Peraturan Menteri Sosial RI nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

#### **2.4.2 Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)**

Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah guna mengurangi angka kemiskinan dan memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku KPM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Tujuan khusus PKH yaitu:

- 1) Meningkatkan taraf pendidikan anak Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
- 2) Meningkatkan status kesehatan ibu hamil dan nifas serta gizi anak balita
- 3) Meningkatkan perolehan pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

#### **2.4.3 Sasaran Penerima Bantuan PKH**

Penerima bantuan PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sesuai dengan kriteria Badan Pusat Statistik (BPS) dan memenuhi satu atau beberapa kriteria program yaitu memiliki Ibu hamil/ nifas, anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan Sekolah Dasar (SD), anak usia SD

dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

Sebagai bukti kepesertaan PKH diberikan kartu peserta PKH atas nama Ibu atau perempuan dewasa. Kartu tersebut digunakan untuk menerima bantuan PKH. Selanjutnya kartu PKH dapat berfungsi sebagai kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk seluruh keluarga penerima PKH tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas 2009.

Penggunaan bantuan PKH ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, karenanya bantuan akan lebih efektif dan terarah, jika penerima bantuannya adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (dapat nenek, tante/bibi, atau kakak perempuan). Dalam kartu peserta PKH yang tercantum adalah nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga. Hal ini dikarenakan apabila dana bantuan program PKH ini diterima oleh kepala keluarga, maka bantuan tersebut dikhawatirkan tidak akan digunakan untuk kebutuhan anak akan tetapi bantuan tersebut dapat disalah gunakan untuk keperluan yang lain seperti contoh dibelikan rokok atau pun hal lainnya.

Pengecualian dari ketentuan di atas dapat dilakukan pada kondisi tertentu, misalnya bila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga maka dapat digantikan oleh kepala keluarga. Kepesertaan PKH tidak menutup keikutsertaannya RTSM pada program-program pemerintah lainnya pada klaster I, seperti: Jamkesmas, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Raskin dan BLT



## 2.4.4 Kewajiban Peserta PKH

### 1. Kewajiban Bidang Kesehatan

Dalam bidang kesehatan, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah ditetapkan menjadi penerima diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam *protocol* pelayanan kesehatan. Adapun *protocol* pelayanan kesehatan bagi peserta PKH meliputi:

- 1) Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali
- 2) Ibu hamil mendapatkan suplemen tablet Fe selama masa kehamilan
- 3) Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih
- 4) Ibu nifas memeriksakan diri sebanyak 3 kali
- 5) Anak usia 0-1 bulan mendapat pemeriksaan kesehatan sebanyak 3 kali
- 6) Anak usia 0-11 bulan ditimbang secara rutin setiap bulan dan mendapat vaksin lengkap sesuai tahapan usia
- 7) Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan vitamin A sebanyak dua kali dalam setahun yaitu bulan Februari dan Agustus
- 8) Anak usia 1-5 tahun perlu ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.

### 2. Kewajiban Pendidikan

Anak peserta PKH usia 7 – 18 tahun harus didaftarkan atau terdaftar pada satuan pendidikan baik SD/ MI/ SDLB/ Salafiyah Ula/ Paket A atau SMP/ MTs/ SMLB/ Salafiyah Wustha/ Paket B termasuk SMP/ MTs serta SMA/ MA/ Sederajat/ Paket C dan mengikuti kehadiran dikelas minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung.

### 2.4.5 Besaran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Besaran bantuan tunai untuk peserta PKH bervariasi tergantung jumlah anggota keluarga yang diperhitungkan dalam penerimaan bantuan, baik komponen kesehatan maupun pendidikan. Besaran bantuan ini dikemudian hari bisa berubah sesuai dengan kondisi keluarga saat itu atau bila peserta tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan.

Tabel 1. Skema Bantuan PKH

Komponen	Besaran Bantuan PKH Pertahun
Ibu Hamil/Balita	Rp. 3.000.000
Anak SD	Rp 900.000
Anak SMP	Rp. 1.500.000
Anak SMA	Rp. 2.000.000
Disabilitas Berat	Rp 2.400.000
Lanjut Usia 60 tahun keatas	Rp 2.400.000

Sumber: Pedoman Umum PKH, 2019

### 2.5 Kelurahan

Menurut PPRI (Praturan Pemerintah Republik Indonesia) Nomor 73 Tahun 2005 mengenai pengertian Kelurahan, “Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat di Daerah Kabupaten/Daerah Kota di bawah Kecamatan”. Kelurahan juga merupakan perangkat di Kecamatan, pimpinan pada kelurahan disebut Kepala Kelurahan. Dalam pembentukan kelurahan ditentukan dari peraturan daerah, Camat mengusulkan agar mengangkat Lurah dari Pegawai Negeri Sipil yang tentunya sudah memenuhi syarat oleh Bupati/Walikota. Lurah menerima pendelegasian kekuasaan di pemerintahan dari Bupati/Walikota. Selaintugas tersebut, tugas Lurah juga mengatur pelaksanaan kegiatan Pemerintahan di Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan pada masyarakat, sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban masyarakat,

serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Lurah didalam menjalankan tugasnya harus bertanggungjawab pada Bupati/walikota atas perantaraan dari Camat.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005, kedudukan kelurahan mempunyai peran terhadap negara yaitu sebagai:

- a. Data, informasi, mobilitas, pengawasan serta bimbingan.
- b. Tempat untuk pengamalan penanaman nilai-nilai Pancasila.
- c. Wadah untuk menumbuhkan dan meningkatkan jiwa gotong royong dalam jiwa masyarakat.
- d. Pembinaan keterlibatan masyarakat di berbagai bidang.
- e. Pembinaan ketertiban dan persatuan nasional dalam melancarkan pembangunan di seluruh indonesia.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebagai tolak ukur bagi peneliti untuk melakukan penelitian

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	“Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di kecamatan Medan selayang” Penelitian Tirtado Sinaga, tahun 2018.	Kualitatif dekriptif	implementasi kebijakan program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Medan Selayang telah berjalan dengan baik. seluruh rangkaian atau proses kegiatan mulai dari sosialisasi awal, refleksi kemiskinan,	perbedaannya penelitian terdahulu membahas PKH yang berfokus pada kesehatan, sedangkan penulis membahas PKH dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

			pelaksanaan program, monitoring program semuanya berjalan dengan baik.	
2.	“Peran Pendamping Program Keluarga Harapan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Magelang Selatan” Penelitian Putri Purwanti, Tahun 2019.	Kualitatif dekriptif	peran pendamping PKH dalam pemberdayaan masyarakat miskin ada empat peran yaitu peran sebagai fasilitator, peran sebagai pendidik, peran sebagai penghubung, dan peran teknik. faktor pendukung yaitu dukungan dari dinas sosial kota magelang, tempat pertemuan yang selalu tersedia, KPM yang antusias dan kritis, dan kepercayaan anggota kpm kepada pendamping untuk mengelola kelompok KPM.	Fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang. Putri Purwanti dalam penelitiannya memilih lokus di Kecamatan Magelang Selatan.
3.	“Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin Di Nagari Malampah Kabupaten Pasaman” Depi Zahrawati, (2018)	Kualitatif dekriptif	PKH berkontribusi kepada peningkatan kesejahteraan keluarga, terbukti dari adanya peningkatan kualitas dan kuantitas pangan, kesehatan, dan pendidikan, sehingga Program cenderung lebih sejahtera.	perbedaannya dalam penelitian terdahulu menggunakan teori George C. Edward III dan penulis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn
4.	Berjudul “Analisis	Kualitatif	mengemukakan	perbedaannya

	Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Keluarga Sangat Miskin (KSM) Penerima Bantuan (studi Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah) Penelitian Slamet Riyadi, Tahun 2018	dekriptif	bahwa PKH yang mengkombinasikan skema bantuan tunai dengan prasyarat berupa komitmen kehadiran peserta PKH	penelitian terdahulu membahas PKH yang berfokus pada komitmen kehadiran peserta PKH, sedangkan penulis membahas PKH dalam mengurangi tingkat kemiskinan.
5	“Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Gulak-Galik Bandar Lampung” Penelitian Triwulandari, tahu 2018.	Kualitatif dekriptif	Dalam hal ini menyoroti tentang Hasil pelayanan dibidang pendidikan dan kesehatan setelah pelaksanaan Keluarga Harapan (PKH) dilakukan	perbedaannya penelitian terdahulu membahas PKH yang berfokus pada pendidikan dan kesehatan, sedangkan penulis membahas PKH dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

## 2.7 Kerangka Pemikiran

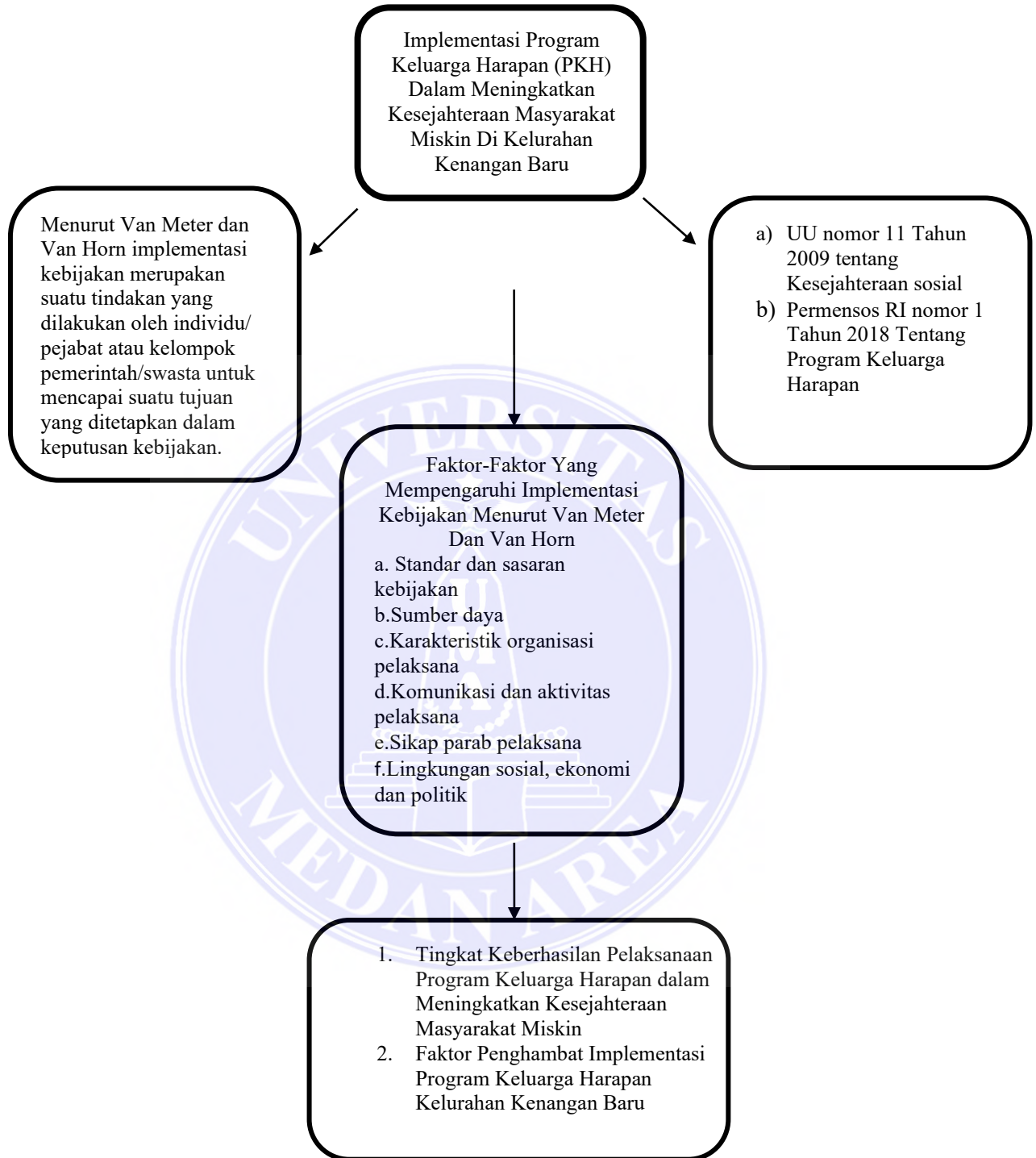
Kerangka Pemikiran merupakan sebuah gambaran berupa konsep yang mana didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Dalam kerangka berpikir adanya hubungan teori dengan berbagai faktor yang sudah diidentifikasi sebagai masalah yang penting yang ada dalam penelitian. Dalam hal ini kerangka berpikir dapat dikatakan sebagai permasalahan topik penelitian.



Kerangka pemikiran merupakan rancangan atau garis besar yang telah dirancang oleh peneliti dalam proses penelitian. Menurut Sugiyono (2015:92) mengemukakan bahwa kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka berfikir yang baik akan mampu menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Peneliti harus dapat memahami dan menguasai teori - teori sebagai acuan atau dasar argumentasi dalam penyusunan sebuah kerangka pemikiran. Berdasarkan uraian tersebut “kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan” (Suriasumantri dalam Sugiyono, 2018: 95).

Adapun teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi Van Meter dan Van Horn ada enam variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, ialah Standar dan sasaran kebijakan, Sumber daya, Karakteristik organisasi pelaksana, Komunikasi dan aktivitas pelaksana, Sikap para pelaksana, Lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Keenam variabel tersebut saling berhubungan, maka untuk mencapai keberhasilan dari kinerja implementasi kebijakan perlu diinternalisasikan dengan sinergi dan intensif.

GAMBAR 1 KERANGKA PEMIKIRAN



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang peneliti lakukan merupakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif mendeskripsikan suatu permasalahan yang sedang diteliti dan berdasarkan analisa peneliti dari fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Penelitian kualitatif akan memberikan gambaran fenomena sosial yang terjadi saat ini sesuai dengan masalah yang diangkat peneliti yaitu Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kelurahan Kenangan Baru. Penelitian kualitatif ini pada umumnya menggunakan kata-kata untuk menjelaskan secara detail permasalahan yang sedang berkembang disuatu instansi pemerintahan. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya dapat menjadi teori baru yang berasal dari sebuah konsep yang akan sedang berkembang di lingkungan sosial. Menurut Creswell dalam Sugiyono (2018:2) metode penelitian merupakan proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interprestasi yang terkait dengan tujuan penelitian.

Menurut Sugiyono (2018:2) metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Penelitian rasional adalah penelitian yang menggunakan teori.

Menurut Denzin dan Lincoln dalam Albi Anggito dan Johan Setiawan (2018:7) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Selanjutnya Erickson dalam Albi Anggito dan Johan Setiawan (2018:7) menyatakan bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.

Melalui penelitian kualitatif ini maka peneliti menggambarkan bagaimana permasalahan yang berhubungan dengan “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kelurahan Kenangan Baru”.

### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang berada di Jln. Cucak Rawa II No.1. Kelurahan Kenangan Baru merupakan salah satu Kelurahan yang melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan luas wilayah 69,16 Ha. Secara administratif Kelurahan Kenangan Baru terdiri atas 14 Lingkungan dengan jumlah penduduk 28.639 Jiwa. Jumlah KK Miskin 827 KK dan jumlah penduduk miskin di Kelurahan Kenangan Baru 2.334 Jiwa. Pemilihan lokasi ini peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana implementasi program keluar harapan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah Untuk mengetahui kendala-kendala dalam penerapan Program Keluarga Harapan di

masyarakat. Maka dengan penelitian ini akan memberikan kontribusi kepada instansi mengenai hal-hal yang harus dibenahi supaya Penerapan kebijakannya semakin meningkat.

Penelitian tentang “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kelurahan Kenangan Baru” dimulai sejak bulan Mei 2022 hingga selesai.

Tabel 3. Waktu Penelitian

NO	Okt 2021	Des 2021	Feb 2022	Mei 2022	Okt 2023	Sept 2024
1. Pengajuan Judul	✓					
2. Penyusunan Proposal		✓				
3. Seminar Proposal			✓			
4. Pelaksanaan Penelitian				✓		
5. Seminar Hasil					✓	
6. Meja Hijau						✓

### 3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang memahami permasalahan atau sumber informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun uraian informan penelitian sebagai berikut :

1. Informan Kunci yaitu mereka yang mengetahui seluruh permasalahan dalam penelitian dan memahami maksud dari permasalahan yang diangkat peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah Lurah Kenangan Baru bapak Rizal Arifin, S.STP.



2. Informan Utama yaitu mereka yang berperan langsung dibidang yang diteliti dan memahami secara teknis permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan utama adalah Pendamping PKH di Kelurahan Kenangan Baru Ibu Windasari S.Sos.
3. Informan Tambahan adalah mereka yang mengetahui informasi terkait bidang yang diteliti walaupun tidak terjun langsung dibidang tersebut. Dari informan tambahan ini hanya sebagai pelengkap dan untuk mempertajam analisis. Yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini adalah Sekretaris Kelurahan Kenangan Baru Bapak Rajin Tarigan dan masyarakat penerima bantuan PKH Ibu Jumi harni dan Ibu Halimatusakdiah Daulay.

#### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2018:296) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi.

1. Observasi (pengamatan)

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2018:203) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.

2. Interview (wawancara)

Menurut Esterbrg dalam Sugiyono (2018:304) wawancara didefinisikan sebagai berikut “ a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction

of meaning about a particular topic”. Artinya wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Sedangkan menurut Susan Stainback dalam Sugiyono (2018:305) mengemukakan bahwa dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Wawancara adalah tanya jawab secara langsung kepada narasumber atau responden yang akan menjadi informan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan.

### 3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:314) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

## 3.5. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2018:319) analisis data didefinisikan sebagai berikut *“data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, field notes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others”* . Artinya analisis data adalah proses

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.

Dalam penelitian ini teknik analisis yang peneliti gunakan adalah teknik analisis data model Miles and Huberman dalam Sugiyono (2018:321) meliputi:

### 1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial atau objek yang diteliti semua yang dilihat dan di dengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.

### 2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema, polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

### 3. Penyajian Data (*Data Display*)

Sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarik kesimpulan dan pengambilan tindakan, data disajikan secara tertulis berdasarkan kenyataan yang faktual dan saling berkaitan, dan penyajian

data ini dimaksudkan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi.

#### 4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Proses menarik kesimpulan dari hasil pembahasan, mencatat keteraturan, pola-pola kejelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsi peneliti dan diverifikasi selama penelitian berlangsung untuk kesimpulan akhir.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Kenangan Baru mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kelurahan Kenangan Baru peneliti mengambil kesimpulan:

1. Pelaksanaan bantuan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan dalam penyaluran PKH ini terdapat beberapa indikator yaitu Standar dan sasaran kebijakan, Sumber daya, Karakteristik organisasi pelaksana, Komunikasi, Sikap para pelaksana, Kondisi sosial dan ekonomi. Pelaksanaan implementasi program keluarga harapan di kelurahan kenangan baru belum terlaksana dengan baik. Kriteria Standar dan sasaran kebijakan terlihat masih banyaknya masyarakat kurang mampu di kelurahan kenangan baru yang tidak mendapatkan bantuan program ini dan juga belum adanya graduasi secara mandiri dari masyarakat penerima PKH.
2. Adapun faktor penghambat dan kendala dalam Pelaksanaan PKH yaitu ditandai dengan data yang ada di DTKS tidak sinkron dengan keadaan KPM, seringkali terjadi keterlambatan dana bantuan saat pencairan, kurangnya Partisipasi dari masyarakat dalam menjalankan kegiatan yang dilakukan setiap bulan oleh Pendamping Sosial serta tidak adanya fasilitas dari pemerintah untuk Program PKH ini dalam kegiatan yang dilakukan setiap bulannya.



## 5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Kenangan Baru mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin ini belum sepenuhnya maksimal adapun saran dari peneliti yaitu:

1. Sebaiknya Kelurahan Kenangan Baru lebih meningkatkan keperdulian dalam menanggapi aduan masyarakat dengan lebih baik, sehingga kejelasan informasi dalam pelaksanaan tersebut menjadi terarah.
2. Kepada masyarakat terus meningkatkan partisipasi kegiatan-kegiatan dan sosialisasi yang diadakan pendamping PKH maupun pihak kelurahan, agar masyarakat penerima bisa mendapatkan manfaat langsung yang diberikan pihak berwenang dalam pelaksanaan program PKH tersebut.

## DAFTAR PUSAKA

### BUKU :

- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Edisi Cet.2*. Bandung : Alfabeta.
- Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka setia.
- Anggito Albi, Setiawan Johan. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Asrori, Mohammad. (2016). *Psikologi Remaja : perkembangan peserta didik*. Jakarta : Bumi Aksara
- Handoyo, Eko. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang : Widya Karya
- Haughton Jonathan, Khandker Shahidur R. (2012). *Pedoman Tentang Kemiskinan Dan Ketimpangan*. (Edward Tanujaya, Terjemahan) Jakarta: Salemba Empat.
- Howard White dan David Booth (2012). *Pedoman Tentang Kemiskinan Dan Ketimpangan*. (Edward Tanujaya, Terjemahan) Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi, Deddy (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Sjafari, Agus, (2014). *Kemiskinan Dan Pemberdayaan Kelompok*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Suaib, Muhammad Ridha. (2016). *Pengantar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Calpulis.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Abbas, M.S. (2001). *Wajah dan dinamika pendidikan anak bangsa*. Yogyakarta : Adicita Karya Nusa.
- Wahab, Solichin Abdul. (2021). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Publik*. Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodra (1994). *Kebijakan Publik: proses dan analisis*. Jakarta : Intermedia.
- Winarmo, Budi. (2007). *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

## JURNAL, SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI

Andi Arnida Esa Putri Abram, Femmy M.G. Tulusan, Very Y. Londa (2019).  
*“Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar di SMK Negeri 1 Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara”*

Auldrin M. Ponto, Novie R. Pioh, Femmy Tasik (2016) *“Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan-Membangun Prasarana Fisik, Sosial dan Ekonomi Di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado”*Vol 3 Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.

Depi Zahrawati, Henni Muchtar (2018) *“Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin Di Nagari Malampah Kabupaten Pasaman”* Journal of Civic Education. Vol 1 no. 4

Ery, K., Imam, Y. P., & Novi, W. (2022). *Kinerja Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Alai Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun.* (Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji).

Herlina (2017) *“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai”* Pascasarjana Universitas Medan Area.

Rachma, M., Hidayat, Y., & Azkia, L. (2022). *Hambatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin.* PADARINGAN. (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi), 4(2), 93-104.

Putri Purwanti. (2018). *“Peran Pendamping Program Keluarga Harapan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Magelang Selatan”* Jurnal Ilmu Adminitrasi Publik. Universitas Terbuka.

Slamet Riyadi, *Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan Terhadap Keluarga Sangat Miskin Penerima Bantuan*,Tesis (Lampung: Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016).

Suyanto, Bagong (2001). *Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin.Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*(4), 25-42.

Tirtado Sinaga. (2018). *“Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di kecamatan Medan selayang”* Jurnal Ilmu

Triwulandari, *Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Gulak-Galik Bandar Lampung.* (Lampung: Jurusan Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

Yuhana, K., & Kartini, T. (2019). *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Cigadung Kabupaten Subang*. *The World of Public Administration Journal*, 63-78.

**Peraturan Perundang-undangan**

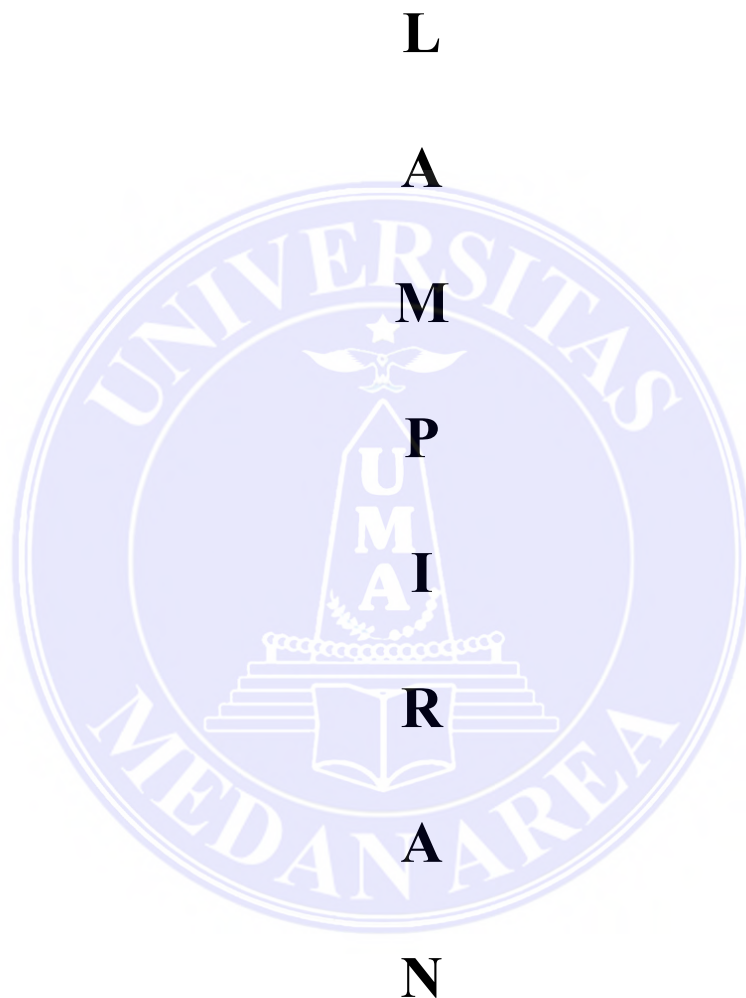
Undang-undang No 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Permensos 1/2018)

**UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.







## LAMPIRAN 1

### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

**Lampiran Wawancara kepada Informan Kunci yaitu kepada Lurah Rizal Arifin, S.STP :**

1. Mulai tahun berapa pelaksanaan program keluarga harapan di Kelurahan Kenangan Baru dan juga berkaitan dengan kriteria seperti apa yang menjadi penerima bantuan program keluarga harapan.?
2. Sasaran dan apa tujuan pada program keluarga harapan?
3. Bagaimana tentang kondisi penerima bantuan PKH?
4. Bagaimana kesadaran KPM tentang mengundurkan diri karena sudah ada peningkatan ekonomi?
5. Tentang penyampaian informasi dan sosialisasi yang didapat dari para pelaksana kebijakan?
6. Apa yang menjadi hambatan kerja dalam penyaluran PKH disini pak?

**Lampiran Wawancara kepada Informan Utama yaitu Ibu Windasari Pendamping Sosial PKH:**

1. Bagaimana kriteria dalam penerimaan bantuan PKH?
2. Apa tujuan yang ada pada program keluarga harapan?
3. Bagaimana tentang kondisi penerima bantuan PKH?
4. Bagaimana kesadaran KPM tentang mengundurkan diri karena sudah ada peningkatan ekonomi?
5. Tentang awal mula penunjukan sebagai pendamping PKH?
6. Pelatihan seperti apa yang dilakukan dalam melaksanakan PKH?
7. Berapa besaran bantuan PKH yang diterima oleh masyarakat?

8. Apa saja yang menjadi syarat sebagai petugas pendamping PKH?
9. Tentang penyampaian informasi dan sosialisasi yang didapat dari para pelaksana kebijakan?
10. Bagaimana sikap kelurahan kenangan baru terhadap pendamping PKH terkait pelaksanaan?
11. Apa saja hambatan dan kendala ibu pendamping dalam menjalankan tugas di Kelurahan Kenangan Baru?

#### **Lampiran Wawancara kepada Informan Tambahan Sekretaris Lurah Bapak**

##### **Rajin Tarigan:**

1. Kriteria seperti apa yang menjadi penerima bantuan program keluarga harapan?
2. Apa tujuan dari program keluarga harapan ini?
3. Apa yang menjadi hambatan kerja dalam penyaluran PKH disini pak?

#### **Lampiran Wawancara kepada Informan Tambahan Masyarakat penerima**

##### **PKH Ibu Jumi harni:**

1. Terkait dengan Besar dana bantuan PKH yang mereka terima.
2. Bagaimana tentang penyampaian informasi dan sosialisasi yang didapat dari para pelaksana kebijakan?
3. Bagaimana sikap pelayanan petugas pendamping terhadap pelaksanaan program keluarga harapan ini?
4. Apa saja kendala dalam pelaksanaan PKH ini?

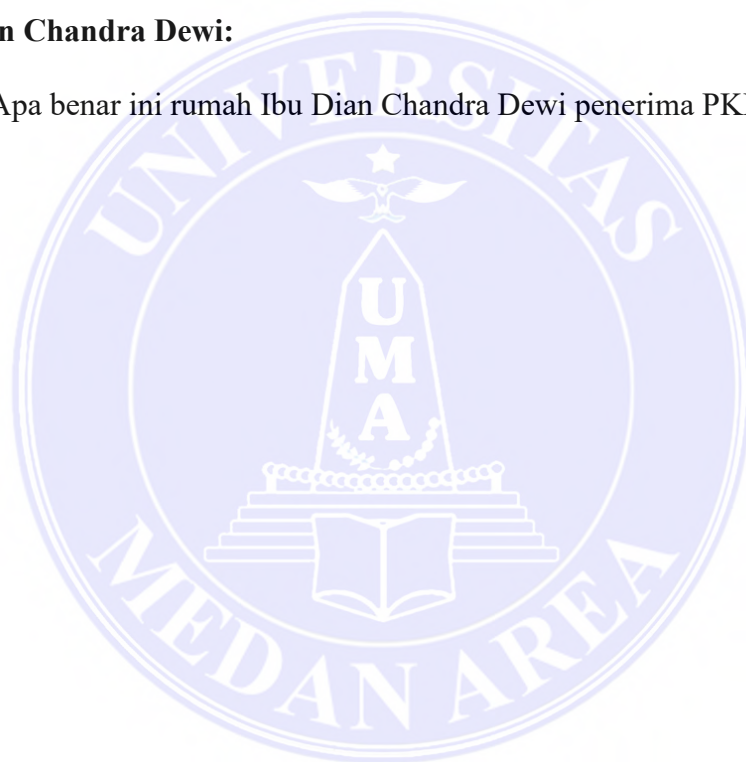
#### **Lampiran Wawancara kepada Informan Tambahan Masyarakat penerima**

##### **PKH ibu Halimatusakdiah Daulay:**

1. Terkait dengan Besaran dana bantuan PKH yang di terima.
2. Bagaimana tentang penyampaian informasi dan sosialisasi yang didapat dari para pelaksana kebijakan?
3. Bagaimana sikap pelayanan petugas pendamping terhadap pelaksanaan program keluarga harapan ini?
4. Apa saja kendala dalam pelaksanaan PKH ini?

**Lampiran Wawancara Informan tambahan PKH kepada seorang Bibi dari Dian Chandra Dewi:**

- 1) Apa benar ini rumah Ibu Dian Chandra Dewi penerima PKH bu?



### LAMPIRAN 3

#### LAMPIRAN DOKUMENTASI DILAPANGAN



Dokumentasi Kantor Kelurahan Kenangan Baru (20 Mei 2022)



Dokumentasi Kantor Kelurahan Kenangan Baru (20 Mei 2022)





Dokumentasi Kantor Kelurahan Kenangan Baru (20 Mei 2022)



Dokumentasi foto bersama Lurah Kenangan Baru (1 Mei 2022)





Dokumentasi Wawancara kepada Ibu Windasari (18 Mei 2022)



Dokumentasi Rumah KPM Ibu Dian



Dokumentasi foto bersama Sekretaris lurah (11Mei 2022)



Dokumentasi Rumah Penerima PKH Ibu Halimatusakdiah Dauley merupakan penerima PKH yang bertempat tinggal di Jalan Perkutut 2 no 47 ( 24 Mei 2022)





Dokumentasi Penerima PKH Ibu Jumi harni salah satu masyarakat penerima PKH yang bertempat tinggal di Jalan Pipit 7 No 500 ( 24 Mei 2022)



Dokumentasi Pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di Aula Kantor Kenangan Baru, (30 Mei 2022).